LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Tabel *Checklist* Kriteria Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan

NAMA PROVINSI :

TAHUN :

CHECKLIST PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				1	0
A	Penyajian informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, serta pencapaian target sesuai Peraturan Daerah APBD				
	1	kebijakan fiskal/keuangan menungkapkan:			
		a	perbedaan penting posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya /dengan anggaran dengan rencana lainnya.		
		b	Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan, efisiensi belanja, dan penentuan sumber atau penggungkaan pembiayaan.		
	2		Ekonomi makro, menjelaskan pengungkapan:		
		a	Asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat pencapaiannya.		
		b	perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.		
B	Ikhtisar pencapaiankinerja keuangan selama tahun pelaporan				
	1		menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPR.		
	2		menjelaskan hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu.		
	3		perbandingan target sebagaimana tertuang dalam APBN/APBD dengan realisasinya.		
C	Dasar penyajian laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan akuntansi keuangan				
	Kebijakan Akuntansi				

	1		Penjelasan pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaian dengan kondisi entitas pelaporan		
			Isi kebijakan akuntansi meliputi penjalasan:		
		a.	Entitas pelaporan		
			i. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta juridiksi tempat entitias tersebut berada		
			ii. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya		
			iii. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.		
			iv. Jumlah unit entitas akuntansi yang secara struktural berada dibawahnya.		
		b	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.		
			Pernyataan penggunaan basis akuntansi yang mendasaro Laporan Keuangan Pemerintah yang semestinya diungkapkan.		
		c.	Basis penyusunan laporan keuangan adalah basis kas menuju akrual (*cash basis toward accrual)*, sehingga:		
			i. Basis yang digunakan dalam laporan keuangan realisasi anggaran adalah basis kas.		
			ii. Basis yang digunakan dalam neraca adalah basis akrual		
		d.	Basis pengakuan dan pengukuran:		
			Aset		
			Pengakuan aset: aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal/diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenugasannya berpindah.		
			Pengukuran aset, sebagai berikut:		
			i. Kas dicatata sebesar nilai nominal		
			ii. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan		
			iii. Piutang dicatat sebesar nilai nominal		
			iv. Persediaan dicatat sebesar: (1) Biaya perolehan apabila dengan pembelian, (2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, (3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.		

			v. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya. Kecuali untuk investasi dalam saham berdasarkan tingkat kepemilikannya, yakni: 20% kepemilikan saham menggunakan metode biaya; 20%-50% kepemilikan saham menggunaan metode ekuitas; >50% menggunakan metode ekuitas. kepemilikan non permanen menggunakan nilai bersih yang direalisasikan.		
			vi. Aset tetap dicatat sebesar biaya erolehan, namun jika tidak dimungkinkan dapat didasarkan pada nilai wajar saat perolehan.		
			vii. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.		
			Kewajiban		
			Pengakuan kewajiban: kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian ang dapat diukur dengan andal/diakui pada saar dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.		
			Pengukuran kewajiban: kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.		
			Kewajiban dalam mata uang asing dinyatakan dalam rupia dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.		
			Ekuitas		
			Ekuitas secara keseluruhan dicatat sebesar selisih antara aset dan kewajiban.		
			Ekuitas dana lancar dicatat sebesar selsih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.		
			Ekuitas dana investasi dicatat sebesar selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.		
			Ekuitas dana cadangan dicatat sebesar cadangan yang ditujukan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		
			Pendapatan		
			Pengakuan pendapatan: pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah		

			Pengukuran pendapatan: berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya.		
			Belanja		
			Pengakuan Belanja: belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah; khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunya fungsi perbendaharaan.		
			Penerimaan Pembiayaan		
			Pengakuan penerimaan pembiayaan saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.		
			Metode penyajian laporan arus kas		
			Metode penyajian yang digunakan untuk menyajikan laporan arus kas dan alasannya.		
		Penjelasan setiap pos pada laporan keuangan			
			NERACA		
			ASET		
			Kas dan setara kas		
			Menjelaskan rincian kas yang terdiri dari:		
			i. Kas di Kas Daerah		
			ii. Kas di Bendahara Pengeluaran		
			iii. Kas di Bendahara Penerimaan		
			Investasi Jangka Pendek		
			Menjelaskan rincian investasi jangka pendek.		
			Perubahan harga pasar		
			Piutang Pajak dan Bukan Pajak		
			Menjelaskan rincian piutang yang mencakup:		
			i. Piutang pajak		
			ii. Piutang Retribusi		
			iii. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
			iv. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
			v. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		
			vi. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
			vii. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
			viii. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
			ix. Piutang Lainnya		
			Persediaan		

			Penjelasaan lebih lanjut mengenai rincian persediaan seperti: perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat; barang/perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi; barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; barang yang masih dalam proses produksi yang ditujukan untuk dijual ayau diserahkan kepada masyarakat.		
			Kondisi persediaan tersebut.		
			Investasi Jangka Panjang		
			Menjelaskan rincian investasi jangka panjang berdasarkan jenisnya, meliputi:		
			i. Investasi Nonpermanen, mencakup:		
			(a) Pinjaman Jangka Panjang		
			(b) Investasi dalam Surat Utang Negara		
			(c) Investasi dalam proyek pembangunan		
			(d) Investasi nonpermanen lainnya		
			Penjelasan singkat atas perusahaan daerah		
			Perubahan pos investasi		
			ii. Investasi permanen, mencakup:		
			(a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
			(b) Investasi Permanen lainnya		
			Penjelasan singkat atas perusahaan daerah		
			Perubahan pos investasi		
			Aset Tetap		
			Menjelaskan klarifikasi aset tetap dan rincian lebih lanjut,meliputi:		
			i. Rincian Tanah		
			Penambahan/Pelepasan Tanah		
			ii. Rincian Peralatan dan Mesin		
			Penambahan/Pelepasan Peralatan dan Mesin		
			iii. Rincian Gedung dan Bangungna		
			Penambahan/Pelepasan Gedung dan Bangunan		
			iv. Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
			Penambahan/Pelepasan Jalan,Irigasi, dan Jaringan		
			v. Rincian Aset Tetap Lainnya		
			Penambahan/Pelepasan Aset Tetap Lainnya		
			vi. Rincian Kontruksi dalam Pengerjaan		
			Informasi penyusutan, meliputi:		
			i. Nilai penyusutan		

			ii. Metode penyusutan yang digunakan		
			iii. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan		
			iv. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode		
		Tambahan jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:			
			i. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap		
			ii. Tanggal efektif penilaian kembali		
			iii. Jika ada, nama penilai independen		
			iv. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti.		
			v. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap		
		Tambahan untuk kontruksi dalam pengerjaan, meliputi:			
			i. Rincian kontrak kontruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaiannya dan jangka waktu penyelesaiannya.		
			ii. Nilai kontrak kontruksi dan sumber pembiayaannya.		
			iii. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan		
			iv. Uang muka kerja yang diberikan		
			v. Retensi		
		Dana cadangan			
			Penjelasan dana cadangan, meliputi:		
			i. Perda pembentukkannya		
			ii. Tujuan, jumlah, bentuk penanaman dana cadangan, dan rencana penggunaannya.		
		Aset Lainnya			
			Menjelaskan rincian aset lainnya yang mencakup:		
			i. Tagihan Penjualan Angsuran		
			ii. Tuntutan Perbendaharaan		
			iii. Tuntutan Ganti Rugi		
			iv. Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
			v. Aset Tak Berwujud		
			vi. Aset Lain-lain		
			KEWAJIBAN		
			Utang Jangka Pendek		
			Rincian utang jangka pendek berdasarkan pemberi pinjaman, mencakup:		
			i. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
			ii. Utang Bunga		

			iii. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
			iv. Pendapatan Dibayar Dimuka		
			v. Utang Belanja		
			vi. Utang Jangka Pendek Lainnya		
			Utang Jangka Panjang		
			Rincian utang jangka panjang berdasarkan pemberi pinjaman, mencakup:		
			i. Utang Dalam Negri-Sektor Perbankan		
			ii. Utang Dalam Negeri- Obligasi		
			iii. Premium (Diskonto) Obligasi		
			iv. Utang Jangka Panjang Lainnya		
			Jumlah tunggakan disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur		
			Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku		
			Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo		
			Biaya pinjaman meliputi perlakuan biaya pinjaman, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan, tingkat kapitalisasi yang digunakan.		
		Utang Jangka Panjang yang direstrukturisasi harus mengungkapkan:			
			i. Pengurangan pinjaman		
			ii. Modifikasi persyaratan utang		
			iii. Pengurangan tingkat bunga pinjaman		
			iv. Pengunduran jatuh tempo pinjaman		
			v. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjama		
			vi. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan		
		EKUITAS			
		klasifikasi ekuitas, meliputi:			
			i. **Ekuitas Dana Lancar**		
			Menjelaskan akun-akun pada ekuitas dana lancar, meliputi:		
			(a) Sisa Lebih Pembayaran Anggarn (SILPA)		
			(b) Cadangan Piutang		
			(c) Cadangan Persediaan		
			(d) Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek		
			ii. **Ekuitas Dana dan Investasi**		

			Menjelaskan akun-akun pada ekuitas dana investasi yang meliputi investasi yang:		
			(a) Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang		
			(b) Diinvestasikan dalam aset tetap		
			(c) Diinvestasikan dalam aset lainnya		
			(d) Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang		
			iii. **Ekuitas Dana Cadangan**		
			Menjelaskan akun-akun pada ekuitas dana cadangan		
			LAPORAN REALISASI ANGGARAN		
			PENDAPATAN		
			Klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan, meliputi:		
			i. Rincian dan penjelasan PAD, yang terdiri dari:		
			(a) Pendapatan pajak daerah		
			(b) Pendapatan retribusi daerah		
			(c) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
			(d) Lain-lain PAD yang sah		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan presentase) atas selisih lebih kurang antara realisasi dan anggaran PAD		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang PAD periode ini dengan PAD periode yang lalu.		
			ii. Rincian dan penjelasan Pendapatan Transfer yang terdiri dari:		
			(a) Dana Perimbangan		
			Dana Bagi Hasil Pajak		
			Dana Bagi Sumber Daya Alam		
			Dana Alokasi Umum		
			Dana Alokasi Khusus		
			(b) Pendapatan Transfer Lainnya		
			Dana otonomi Khusus		
			Dana penyesuaian		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan presentase) atas selisih lebih kurang antara realisasi dan anggaran transfer		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara transfer periode ini dan transfer periode yang lalu.		

			iii. Rincian dan Penjelasan lain-lain pendapatan yang sah, yang terdiri dari:		
			(a) Pendapatan Hibah		
			(b) Pendapatan Dana Darurat		
			(c) Pendapatan lainnya		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran lain-lain pendapatan yang sah.		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas seisih lebih/kurang antara lain-lain pendapatan yang sah periode ini dan lain-lain pendapatan yang sah periode lalu		
			BELANJA		
			i. Rincian dan penjelasan belanja operasi, yang terdiri dari:		
			(a) Belanja Pegawai		
			(b) Belanja Barang		
			(c) Bunga		
			(d) Subsidi		
			(e) Hibah		
			(f) Bantuan Sosial		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prontase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran belanja		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antra belanja periode ini dan belanja periode yang lalu.		
			ii. Rincian dan penjelasan belanja modal, yang terdiri dari:		
			(a) Belanja Tanah		
			(b) Belanja Peralatan dan Mesin		
			(c) Belanja Gedung dan Bangunan		
			(d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		
			(e) Belanja Aset Teap Lainnya		
			(f) Belanja Aset Lainnya		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran belanja		

			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara belanja periode ini dan belanja periode yang lalu.		
			iii. Belanja Tak Terduga		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas seisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran belanja		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara belanja periode ini dan belanja periode yang lalu.		
			TRANSFER		
			i. Rincian transfer/bagi hasil pendapatan ke kabupaten/kota, terdiri dari:		
			(a) Bagi hasil pajak ke kabupaten/kota		
			(b) Retribusi		
			(c) Pendapatan lainnya		
			Penjelasan (dengan nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran transfer.		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara belanja periode ini dan belanja periode yang lalu.		
			PEMBIAYAAN		
			i. Rincian penerimaan pembiayaan, mencakup:		
			(a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA)		
			(b) Pencairan dana cadangan		
			(c) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
			(d) Pinjaman Dalam Negeri		
			(e) Penerimaan kembali pinjaman		
			(f) Penerimaan piutang daerah		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurnag antara realisasi dan anggaran penerimaan pebiayaan.		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara penerimaan pemiayaan periode ini dan penerimaan pembiayaan periode yang lalu		
			ii. Rincian pengeluaran pembiayaan		
			(a) Pembentukkan dana cadangan		
			(b) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		

			(c) Pembayaran pokok Pinjaman Dalam Negeri		
			(d) Pemberian pinjaman		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran pengeluaran pembiayaan.		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara pengeluaran pembiayaan periode ini dan pengeluaran pembiayaan periode yang lalu.		
			LAPORAN ARUS KAS		
			i. Menjelaskan komponen arus masuk kas dan arus masuk keluar dari aktivitas operasi		
			ii. Menjelaskan komponen arus masuk kas dan arus keluar kas dari investasi aset non keuangan		
			iii. Menjelaskan komponen arus masuk kas dan arus masuk keluar dari aktivitas pembiayaan		
			iv. Menjelaskan komponen arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas non anggaran		
		e.	Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan masa transisi SAP		
		f.	Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan		
D	Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh pernyataan SAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan				
			Penjelasan mengenai kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.		
E	Pengungkapan lainnya.				
			Mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti manajemen pemerintahan selama tahun berjalan, kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru, penggabungan/pemekaran entitas tahun berjalan, kejadian yang mempunyai dampak sosial.		
			Total item		

Sumber (Octasia, 2018), (Undang-undang Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan)

LAMPIRAN 2
UKURAN LEGISLATIF

Kota/Kabupaten	Jumlah DPRD
Kota Banda Aceh	30
Kota Sabang	20
Kab. Aceh Jaya	20
Kab. Aceh Utara	45
Kab. Nias	25
Kota Medan	50
Kab. Solok	35
Kota Bukittinggi	25
Kota Padang	45
Kota Pekanbaru	45
Kab. Muaraenim	45
Kota Lubuklinggau	30
Kab. Lampung Utara	45
Kab. Bangka	35
Kota Pangkalpinang	30
Kota Batam	50
Kota Bandung	50
Kota Bekasi	50
Kota Bogor	45
Kota Depok	25
Kab. Garut	50
Kab. Cianjur	50
Kota Semarang	50
Kota Surakarta	45
Kota Magelang	25
Kota Tegal	30
Kab. Wonosobo	41
Kab. Boyolali	26
Kab. Purworejo	45
Kab. Brebes	50
Kab. Cilacap	50
Kota Salatiga	25
Kota Pekalongan	35
Kab. Bantul	45
Kab. Kulon Progo	40

Kab. Sleman	50
Kota Yogyakarta	30
Kab. Gresik	50
Kota Surabaya	50
Kota Malang	45
Kab. Sidoarjo	50
Kota Serang	45
Kota Tangerang	50
Kab. Gianyar	40
Kota Mataram	40
Kab. Lombok Timur	50
Kab. Alor	30
Kab. Flores timur	30
Kota Kupang	35
Kab. Mempawah	30
Kab. Melawi	30
Kota Pontianak	45
Kota Singkawang	30
Kota Palangkaraya	30
Kab. Kapuas	40
Kab. Barito Timur	25
Kab. Banjar	45
Kota Balikpapan	45
Kota Bontang	25
Kota Samarinda	45
Kota Tarakan	25
Kota Nunukan	25
Kota Manado	40
Kota Tomohon	20
Kab. Minahasa	35
Kota Palu	35
Kab. Poso	30
Kab. Bone	45
Kab. Sinjai	30
Kota Makassar	50
Kab. Boalemo	25
Kab. Mamuju	35
Kab. Buru	20
Kota Ambon	35
Kota Ternate	30
Kota Tidore Kepualuan	25

Kab. Marauke	30
Kab. Asmat	20
Kota Jayapura	40
Kab. Fakfak	20
Kab. Raja Ampat	20
Kota Sorong	30
Kab. Bangli	30
Kab. Landak	35
Kab. Seruyan	25
Kab. Tapin	25
Kab. Paser	30
Kab. Bitung	30
Kab. Kampar	45
Kab. Tebo	35
Kab. Karo	35
Kab. Bandar Lampung	45
Kab. Natuna	20
Kab. Labuhan Batu	45
Kab. Simalungun	50
Kab. Tobasamosir	30
Kab. Rokan Hilir	45
Kab. Klaten	50

LAMPIRAN 3

JUMLAH OPD

Kota/Kabupaten	Jumlah SKPD
Kota Banda Aceh	42
Kota Sabang	36
Kab. Aceh Jaya	41
Kab. Aceh Utara	63
Kab. Nias	43
Kota Medan	62
Kab. Solok	45
Kota Bukittinggi	32
Kota Padang	43
Kota Pekanbaru	44
Kab. Muaraenim	54
Kota Lubuklinggau	39
Kab. Lampung Utara	58
Kab. Bangka	51
Kota Pangkalpinang	37
Kota Batam	45
Kota Bandung	64
Kota Bekasi	50
Kota Bogor	37
Kota Depok	40
Kab. Garut	76
Kab. Cianjur	74
Kota Semarang	52
Kota Surakarta	30
Kota Magelang	46
Kota Tegal	64
Kab. Wonosobo	71
Kab. Boyolali	49
Kab. Purworejo	67
Kab. Brebes	52
Kab. Cilacap	54
Kota Salatiga	26
Kota Pekalongan	56
Kab. Bantul	46
Kab. Kulon Progo	44

Kab. Sleman	57
Kota Yogyakarta	43
Kab. Gresik	50
Kota Surabaya	74
Kota Malang	32
Kab. Sidoarjo	48
Kota Serang	34
Kota Tangerang	43
Kab. Gianyar	36
Kota Mataram	40
Kab. Lombok Timur	54
Kab. Alor	81
Kab. Flores timur	115
Kota Kupang	44
Kab. Mempawah	38
Kab. Melawi	40
Kota Pontianak	37
Kota Singkawang	32
Kota Palangkaraya	35
Kab. Kapuas	58
Kab. Barito Timur	24
Kab. Banjar	63
Kota Balikpapan	68
Kota Bontang	47
Kota Samarinda	46
Kota Tarakan	42
Kota Nunukan	51
Kota Manado	135
Kota Tomohon	57
Kab. Minahasa	34
Kota Palu	35
Kab. Poso	42
Kab. Bone	43
Kab. Sinjai	42
Kota Makassar	54
Kab. Boalemo	39
Kab. Mamuju	52
Kab. Buru	41
Kota Ambon	67
Kota Ternate	41
Kota Tidore Kepualuan	77

Kab. Marauke	38
Kab. Asmat	27
Kota Jayapura	44
Kab. Fakfak	55
Kab. Raja Ampat	65
Kota Sorong	37
Kab. Bangli	38
Kab. Landak	43
Kab. Seruyan	44
Kab. Tapin	38
Kab. Paser	33
Kab. Bitung	39
Kab. Kampar	58
Kab. Tebo	47
Kab. Karo	53
Kab. Bandar Lampung	57
Kab. Natuna	47
Kab. Labuhan Batu	40
Kab. Simalungun	101
Kab. Tobasamosir	48
Kab. Rokan Hilir	55
Kab. Klaten	56

LAMPIRAN 4

PENDIDIKAN TERAKHIR KEPALA DAERAH

Kota/Kabupaten	Pendidikan Terakhir
Kota Banda Aceh	3
Kota Sabang	1
Kab. Aceh Jaya	3
Kab. Aceh Utara	1
Kab. Nias	4
Kota Medan	4
Kab. Solok	3
Kota Bukittinggi	2
Kota Padang	2
Kota Pekanbaru	3
Kab. Muaraenim	3
Kota Lubuklinggau	4
Kab. Lampung Utara	3
Kab. Bangka	3
Kota Pangkalpinang	3
Kota Batam	3
Kota Bandung	3
Kota Bekasi	4
Kota Bogor	4
Kota Depok	3
Kab. Garut	3
Kab. Cianjur	4
Kota Semarang	3
Kota Surakarta	3
Kota Magelang	2
Kota Tegal	3
Kab. Wonosobo	3
Kab. Boyolali	3
Kab. Purworejo	3
Kab. Brebes	2
Kab. Cilacap	1
Kota Salatiga	3
Kota Pekalongan	2
Kab. Bantul	4
Kab. Kulon Progo	4

Kab. Sleman	4
Kota Yogyakarta	4
Kab. Gresik	4
Kota Surabaya	4
Kota Malang	4
Kab. Sidoarjo	3
Kota Serang	2
Kota Tangerang	3
Kab. Gianyar	3
Kota Mataram	1
Kab. Lombok Timur	4
Kab. Alor	3
Kab. Flores timur	2
Kota Kupang	4
Kab. Mempawah	4
Kab. Melawi	2
Kota Pontianak	3
Kota Singkawang	2
Kota Palangkaraya	2
Kab. Kapuas	3
Kab. Barito Timur	2
Kab. Banjar	1
Kota Balikpapan	2
Kota Bontang	4
Kota Samarinda	3
Kota Tarakan	4
Kota Nunukan	2
Kota Manado	4
Kota Tomohon	2
Kab. Minahasa	3
Kota Palu	3
Kab. Poso	1
Kab. Bone	3
Kab. Sinjai	2
Kota Makassar	4
Kab. Boalemo	2
Kab. Mamuju	3
Kab. Buru	3
Kota Ambon	2
Kota Ternate	4
Kota Tidore Kepualuan	1

Kab. Marauke	2
Kab. Asmat	2
Kota Jayapura	3
Kab. Fakfak	1
Kab. Raja Ampat	2
Kota Sorong	4
Kab. Bangli	3
Kab. Landak	3
Kab. Seruyan	3
Kab. Tapin	4
Kab. Paser	4
Kab. Bitung	2
Kab. Kampar	3
Kab. Tebo	3
Kab. Karo	2
Kab. Bandar Lampung	3
Kab. Natuna	3
Kab. Labuhan Batu	3
Kab. Simalungun	3
Kab. Tobasamosir	2
Kab. Rokan Hilir	1
Kab. Klaten	2

LAMPIRAN 5

LUAS WILAYAH

Kota/Kabupaten	luas
Kota Banda Aceh	61,36
Kota Sabang	153
Kab. Aceh Jaya	3812,99
Kab. Aceh Utara	3236,86
Kab. Nias	1842,51
Kota Medan	265,1
Kab. Solok	3738
Kota Bukittinggi	25,24
Kota Padang	693,66
Kota Pekanbaru	632,27
Kab. Muaraenim	7383,9
Kota Lubuklinggau	401,5
Kab. Lampung Utara	2715,87
Kab. Bangka	4050
Kota Pangkalpinang	89,4
Kota Batam	960,25
Kota Bandung	167,67
Kota Bekasi	206,61
Kota Bogor	118,5
Kota Depok	200,29
Kab. Garut	3074,07
Kab. Cianjur	3840,16
Kota Semarang	392
Kota Surakarta	44,03
Kota Magelang	1085
Kota Tegal	39,68
Kab. Wonosobo	984,68
Kab. Boyolali	1015
Kab. Purworejo	1034
Kab. Brebes	1902,37
Kab. Cilacap	2385
Kota Salatiga	56,781
Kota Pekalongan	45,25
Kab. Bantul	506,85
Kab. Kulon Progo	586,27

Kab. Sleman	574,82
Kota Yogyakarta	32,5
Kab. Gresik	1191,25
Kota Surabaya	350,54
Kota Malang	145,28
Kab. Sidoarjo	634,38
Kota Serang	266,71
Kota Tangerang	153,93
Kab. Gianyar	368
Kota Mataram	61,3
Kab. Lombok Timur	1230,76
Kab. Alor	2864,6
Kab. Flores timur	1813,2
Kota Kupang	26,18
Kab. Mempawah	2797,88
Kab. Melawi	10640,8
Kota Pontianak	107,8
Kota Singkawang	504
Kota Palangkaraya	2399,5
Kab. Kapuas	14999
Kab. Banjar	4688
Kota Balikpapan	527
Kota Bontang	406,7
Kota Samarinda	783
Kota Tarakan	250,8
Kota Nunukan	13841
Kota Manado	157,27
Kota Tomohon	114,2
Kab. Minahasa	1114,87
Kota Palu	395,06
Kab. Poso	7112,25
Kab. Bone	4559
Kab. Sinjai	819,96
Kota Makassar	175,77
Kab. Boalemo	2567
Kab. Mamuju	4999
Kab. Buru	5577
Kota Ambon	298,61
Kota Ternate	111,39
Kota Tidore Kepualuan	1645,73
Kab. Marauke	44071

Kab. Asmat	31983,69
Kota Jayapura	935,92
Kab. Fakfak	14320
Kab. Raja Ampat	8034,44
Kota Sorong	656,64
Kab. Bangli	490,71
Kab. Landak	9909
Kab. Seruyan	16404
Kab. Tapin	2700,82
Kab. Paser	7730,88
Kab. Bitung	304
Kab. Kampar	10928,2
Kab. Tebo	6461
Kab. Karo	2127,25
Kab. Bandar Lampung	296
Kab. Natuna	2009,85
Kab. Labuhan Batu	2562,1
Kab. Simalungun	4386,6
Kab. Tobasamosir	2021
Kab. Rokan Hilir	8881,59
Kab. Klaten	658,22

LAMPIRAN 6

TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Kota/Kabupaten	Item yang diungkapkan
Kota Banda Aceh	155
Kota Sabang	142
Kab. Aceh Jaya	140
Kab. Aceh Utara	139
Kab. Nias	140
Kota Medan	145
Kab. Solok	171
Kota Bukittinggi	156
Kota Padang	168
Kota Pekanbaru	154
Kab. Muaraenim	164
Kota Lubuklinggau	158
Kab. Lampung Utara	176
Kab. Bangka	158
Kota Pangkalpinang	167
Kota Batam	171
Kota Bandung	175
Kota Bekasi	160
Kota Bogor	150
Kota Depok	143
Kab. Garut	156
Kab. Cianjur	155
Kota Semarang	185
Kota Surakarta	180
Kota Magelang	174
Kota Tegal	182
Kab. Wonosobo	165
Kab. Boyolali	160
Kab. Purworejo	170
Kab. Brebes	160
Kab. Cilacap	150
Kota Salatiga	180
Kota Pekalongan	184

Kab. Bantul	174
Kab. Kulon Progo	169
Kab. Sleman	175
Kota Yogyakarta	170
Kab. Gresik	165
Kota Surabaya	175
Kota Malang	164
Kab. Sidoarjo	150
Kota Serang	165
Kota Tangerang	160
Kab. Gianyar	170
Kota Mataram	160
Kab. Lombok Timur	165
Kab. Alor	160
Kab. Flores timur	170
Kota Kupang	155
Kab. Mempawah	150
Kab. Melawi	160
Kota Pontianak	165
Kota Singkawang	171
Kota Palangkaraya	172
Kab. Kapuas	171
Kab. Banjar	170
Kota Balikpapan	169
Kota Bontang	172
Kota Samarinda	175
Kota Tarakan	174
Kota Nunukan	165
Kota Manado	163
Kota Tomohon	177
Kab. Minahasa	160
Kota Palu	164
Kab. Poso	168
Kab. Bone	161
Kab. Sinjai	169
Kota Makassar	167
Kab. Boalemo	159
Kab. Mamuju	163
Kab. Buru	159
Kota Ambon	162
Kota Ternate	164

Kota Tidore Kepualuan	166
Kab. Marauke	158
Kab. Asmat	169
Kota Jayapura	154
Kab. Fakfak	149
Kab. Raja Ampat	148
Kota Sorong	157
Kab. Bangli	161
Kab. Landak	155
Kab. Seruyan	160
Kab. Tapin	169
Kab. Paser	164
Kab. Bitung	182
Kab. Kampar	170
Kab. Tebo	162
Kab. Karo	166
Kab. Bandar Lampung	170
Kab. Natuna	176
Kab. Labuhan Batu	139
Kab. Simalungun	143
Kab. Tobasamosir	136
Kab. Rokan Hilir	164
Kab. Klaten	155

LAMPIRAN 7

UMUR ADMINISTRATIF PEMERINTAHAN DAERAH

Kota/Kabupaten	Umur Pemerintahan
Kota Banda Aceh	61
Kota Sabang	52
Kab. Aceh Jaya	15
Kab. Aceh Utara	72
Kab. Nias	72
Kota Medan	46
Kab. Solok	61
Kota Bukittinggi	70
Kota Padang	72
Kota Pekanbaru	71
Kab. Muaraenim	71
Kota Lubuklinggau	16
Kab. Lampung Utara	65
Kab. Bangka	67
Kota Pangkalpinang	59
Kota Batam	18
Kota Bandung	67
Kota Bekasi	35
Kota Bogor	67
Kota Depok	35
Kab. Garut	35
Kab. Cianjur	34
Kota Semarang	67
Kota Surakarta	67
Kota Magelang	67
Kota Tegal	31
Kab. Wonosobo	67
Kab. Boyolali	67
Kab. Purworejo	67
Kab. Brebes	67
Kab. Cilacap	67
Kota Salatiga	67
Kota Pekalongan	67

Kab. Bantul	67
Kab. Kulon Progo	67
Kab. Sleman	67
Kota Yogyakarta	67
Kab. Gresik	60
Kota Surabaya	67
Kota Malang	16
Kab. Sidoarjo	67
Kota Serang	10
Kota Tangerang	24
Kab. Gianyar	13
Kota Mataram	24
Kab. Lombok Timur	59
Kab. Alor	25
Kab. Flores timur	59
Kota Kupang	18
Kab. Mempawah	18
Kab. Melawi	13
Kota Pontianak	58
Kota Singkawang	16
Kota Palangkaraya	60
Kab. Kapuas	55
Kab. Banjar	54
Kota Balikpapan	58
Kota Bontang	18
Kota Samarinda	58
Kota Tarakan	20
Kota Nunukan	18
Kota Manado	66
Kota Tomohon	14
Kab. Minahasa	14
Kota Palu	39
Kab. Poso	58
Kab. Bone	66
Kab. Sinjai	58
Kota Makassar	67
Kab. Boalemo	17
Kab. Mamuju	58
Kab. Buru	18
Kota Ambon	59
Kota Ternate	18

Kota Tidore Kepualuan	14
Kab. Marauke	48
Kab. Asmat	14
Kota Jayapura	24
Kab. Fakfak	14
Kab. Raja Ampat	14
Kota Sorong	18
Kab. Bangli	61
Kab. Landak	18
Kab. Seruyan	15
Kab. Tapin	52
Kab. Paser	56
Kab. Bitung	27
Kab. Kampar	61
Kab. Tebo	18
Kab. Karo	23
Kab. Bandar Lampung	67
Kab. Natuna	18
Kab. Labuhan Batu	67
Kab. Simalungun	37
Kab. Tobasamosir	19
Kab. Rokan Hilir	18
Kab. Klaten	67

LAMPIRAN 8

JUMLAH PENDUDUK

Kota/Kabupaten	jumlah penduduk
Kota Banda Aceh	238814
Kota Sabang	40404
Kab. Aceh Jaya	86058
Kab. Aceh Utara	575895
Kab. Nias	136115
Kota Medan	2210624
Kab. Solok	375801
Kota Bukittinggi	115986
Kota Padang	883767
Kota Pekanbaru	886226
Kab. Muaraenim	567450
Kota Lubuklinggau	217119
Kab. Lampung Utara	885591
Kab. Bangka	309065
Kota Pangkalpinang	207420
Kota Batam	1062250
Kota Bandung	2404589
Kota Bekasi	2409083
Kota Bogor	1005012
Kota Depok	1809120
Kab. Garut	2210017
Kab. Cianjur	2246663
Kota Semarang	1815729
Kota Surakarta	557202
Kota Magelang	1219371
Kota Tegal	247212
Kab. Wonosobo	900653
Kab. Boyolali	930531
Kab. Purworejo	948000
Kab. Brebes	1792511
Kab. Cilacap	1888129
Kota Salatiga	183815
Kota Pekalongan	224063

Kab. Bantul	911503
Kab. Kulon Progo	470520
Kab. Sleman	1093110
Kota Yogyakarta	636660
Kab. Gresik	1251754
Kota Surabaya	2827892
Kota Malang	834545
Kab. Sidoarjo	1827064
Kota Serang	630320
Kota Tangerang	1651428
Kab. Gianyar	492757
Kota Mataram	419506
Kab. Lombok Timur	1289907
Kab. Alor	209974
Kab. Flores timur	280178
Kota Kupang	438005
Kab. Mempawah	301715
Kab. Melawi	228787
Kota Pontianak	655572
Kota Singkawang	232993
Kota Palangkaraya	258550
Kab. Kapuas	409862
Kab. Banjar	470160
Kota Balikpapan	619983
Kota Bontang	174292
Kota Samarinda	766015
Kota Tarakan	253026
Kota Nunukan	185449
Kota Manado	466176
Kota Tomohon	98013
Kab. Minahasa	336015
Kota Palu	363867
Kab. Poso	243025
Kab. Bone	717268
Kab. Sinjai	236497
Kota Makassar	1334090
Kab. Boalemo	145619
Kab. Mamuju	279393
Kab. Buru	132100
Kota Ambon	375760
Kota Ternate	215524

Kota Tidore Kepualuan	111431
Kab. Marauke	221886
Kab. Asmat	103074
Kota Jayapura	417492
Kab. Fakfak	84692
Kab. Raja Ampat	62861
Kota Sorong	275618
Kab. Bangli	264945
Kab. Landak	443265
Kab. Seruyan	180201
Kab. Tapin	164200
Kab. Paser	254503
Kab. Bitung	269396
Kab. Kampar	688204
Kab. Tebo	297735
Kab. Karo	389591
Kab. Bandar Lampung	1175397
Kab. Natuna	76192
Kab. Labuhan Batu	472215
Kab. Simalungun	8499405
Kab. Tobasamosir	180649
Kab. Rokan Hilir	504591
Kab. Klaten	1304519

LAMPIRAN 9

HASIL UJI DAN REGRESI

1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DPRD	97	3.00	3.91	3.5763	.27299
SKPD	97	3.26	4.39	3.8500	.24541
PENDIDIKAN	97	.00	1.39	.9717	.39618
PENDUDUK	97	10.61	15.96	13.0182	.99546
LUAS	97	3.23	10.69	6.8227	1.73792
UMUR	97	2.30	4.28	3.6324	.62966
PENGUNGKAPAN	97	.52	.70	.6171	.04088
Valid N (listwise)	97				

2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		97
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.03897876
Most Extreme Differences	Absolute	.068
	Positive	.042
	Negative	-.068
Test Statistic		.068
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

3. Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.609	.075		8.081	.000		
	DPRD	.040	.026	.267	1.514	.134	.324	3.087
	SKPD	.008	.019	.046	.406	.686	.801	1.249
	PENDIDIKAN	.008	.011	.073	.675	.502	.860	1.163
	PENDUDUK	-.012	.007	-.297	-1.627	.107	.303	3.301
	LUAS	-.005	.003	-.214	-2.003	.048	.883	1.132
	UMUR	.006	.007	.091	.803	.424	.795	1.258

a. Dependent Variable: PENGUNGKAPAN

4. Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot
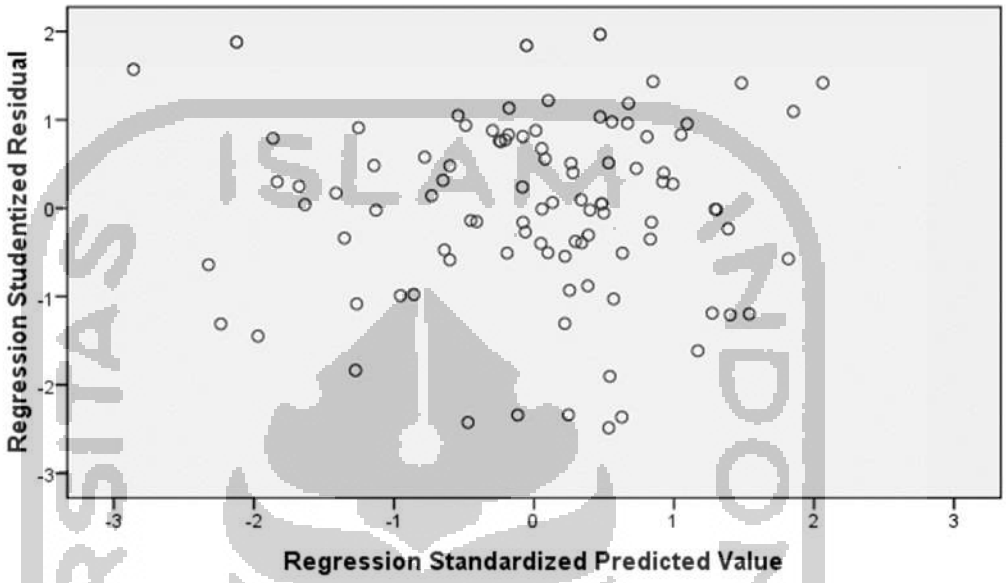
Dependent Variable: PENGUNGKAPAN